

Analisis Wacana Makrostruktural Pemberitaan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017

Vidya Mandarani
Nyoman Suwarta

(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
email: vmandarani@yahoo.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis makrostruktural wacana pemberitaan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan menggunakan analisis wacana kritis. Penelitian ini menggunakan teori dan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough dalam dimensi makrostruktural. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap media yang memuat berita mengenai Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari analisis makrostruktural dapat diketahui bahwa dari berbagai media yang dihimpun, dapat ditemukan bahwa terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, yakni Ahok dalam masa kampanyenya terganjal kasus penistaan agama. Hal ini dapat dijadikan motif politik untuk tujuan memenangkan Pilkada DKI Jakarta melalui kasus penistaan agama tersebut. Salah satunya adalah besarnya hasrat politik untuk mengganjal Ahok melalui kasus penistaan agama, karena Ahok tidak berhasil diganjal melalui berbagai kasus kriminal lainnya.

Kata kunci: analisis wacana, makrostruktural, Pilkada

Abstract

This study aims to find out the news macrostructural discourse analysis of Ahok in 2017 Jakarta's election by using critical discourse analysis. This research applies the theory and method of Norman Fairclough critical discourse analysis in macrostructural dimension. This study is a qualitative research through the literature study on the media about Ahok in the Jakarta elections in 2017. From these results it can be concluded that the macrostructural analysis can be seen that the various media collected, it can be found that related to the upcoming elections in 2017 Jakarta's election, namely Ahok during the campaign hampered charged with blasphemy. It can be used as a political motive for the purpose of winning the elections of Jakarta through the blasphemy case. One is the size of a political desire to prop Ahok through cases of blasphemy, because Ahok not successfully tackled through various other criminal cases.

Keywords: discourse analysis, macrostructural, local elections.

Pendahuluan

Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat meyerap perhatian masyarakat dalam pemberitaannya. Tak dapat dipungkiri bahwa sosok calon gubernur DKI Jakarta memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda sehingga sangat kompetitif dan menjadi ajang politik yang sangat menarik. Salah satu calon gubernur yang juga merupakan gubernur aktif pada saat ini adalah Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang sepak terjangnya dalam bidang politik dan kegiatannya sebagai gubernur sangat menarik perhatian publik. Pemberitaan media sangat berpengaruh pada pembentukan opini masyarakat. Dalam hal ini bahasa media dianalisis melalui aspek kebahasaan, melainkan juga menghubungkan antara bahasa dengan konteksnya, yaitu praktik kekuasaan.

Analisis wacana kritis bertujuan membantu menganalisis dan memahami masalah sosial antara ideologi dan kekuasaan. Tujuan dari analisis wacana kritis suatu media adalah untuk mengembangkan asumsi-asumsi yang bersifat ideologis di dalam masyarakat yang terkandung di balik makna kata dalam teks atau ucapan (Habermas dalam Darma, 2009). Dalam hal ini analisis wacana tidak hanya melihat unsur sosial, namun juga lebih mendalam membahas tentang unsur politik, ekonomi dan budaya yang dibentuk oleh media dalam melihat sosok Ahok. Wacana dapat dikatakan merupakan bangunan teoritis yang abstrak, makna yang terkandung di dalamnya dapat dikaji berdasarkan konteks dan situasi komunikasinya. Berdasarkan latar belakang diatas, akan dibahas analisis praktik sosial, politik, ekonomi dan budaya mengenai pemberitaan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2008) adalah sebuah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari sesuatu yang diamati. Sumber data dari penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka untuk memperoleh data makrostruktural dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemudian analisis praktik sosio budaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media sesungguhnya mempengaruhi bagaimana wacana yang ada dalam media. Maka dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang Ahok diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat dengan melihat aspek sosial, budaya dan politik dari kesatuan analisis yang utuh dari analisis teks, praktik wacana dan praktik sosio budaya media yang mengacu kepada makna ideologi wacana pemberitaan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia didirikan oleh para *founding father* pada 17 Agustus 1945 dengan dasar UUD 1945 dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, apakah maksud dua hal tersebut menjadi kesepakatan pendiri bangsa ini? Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan berbagai persoalan bangsa yang terjadi saat ini, salah satunya kasus yang menghebohkan *dugaan* penistaan agama yang dilakukan Ahok. Muslim di Indonesia merupakan populasi terbesar di dunia, saat ini terdapat 90% dari 250 juta penduduk beragama Islam, saat demo penistaan agama Islam 412 dan 212 di Jakarta, kita bisa melihat langsung besarnya populasi tersebut. Sebagian besar motivasi umat muslim yang terlibat demo saat itu karena tidak mau agamanya dihina, terlebih oleh orang dari pemeluk agama lain, tanpa melihat akar masalah sesungguhnya. Itulah masalah bangsa yang saat ini sedang terjadi, yang mengoyak sendi kehidupan masyarakat bahkan hampir menjadikan perpecahan Negara, masalah kebangsaan yang menghendaki pemikiran bijaksana dan rasional dari kita semua untuk menyelesaikannya.

Apakah substansi masalah sesungguhnya dari kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, sehingga mengguncang kehidupan nasional Indonesia, bahkan berpotensi menjadikan Indonesia terbelah. Kita perlu memahami lebih objektif dan rasional untuk menjawab pertanyaan tersebut karena saat ini ada beberapa pihak ternyata memanfaatkan kasus tersebut untuk berbagai kepentingan. Terdapat motif yang patut diduga di balik hebohnya kasus Ahok, kami mengenali setidaknya ada motif utama terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu terkait Pilkada dan pemimpin non muslim dengan mengutip surat Al Maidah ayat 51 adalah faktor utama

kasus tersebut. Mengapa pernyataan Ahok menjadi heboh? Mengapa sebagian umat muslim tersulut emosi? Jawabannya terdapat pada motivasi Buni Yan sesungguhnya ketika mengupload video tersebut dan keberadaan media sosial yang menyebabkan begitu cepat video tersebut menyebar sehingga memicu kemarahan sebagian umat muslim Indonesia. Saat ini Buni Yani sebagai orang pertama yang mengupload video dan ternyata melakukan editing terhadap ucapan Ahok, telah ditetapkan Polri sebagai tersangka. Masalah utama terletak pada upaya menghilangkan beberapa kata saat Ahok berdialog sehingga yang muncul di video seolah Ahok mengatakan “agama Islam membohongi penduduk di Kepulauan Seribu untuk melarang pemimpin dari non muslim”. Pernyataan Ahok” ...Bapak-ibu (pemilih muslim)... dibohongi surat Al Maidah 51”...(dan) masuk neraka (juga Bapak-ibu) dibodohi.”. Inilah awal sesungguhnya kasus pada Kamis, 6 Oktober 2016. Patut disesalkan reaksi yang muncul kemudian, beberapa pihak menggunakan momen ini untuk menyerang Ahok, baik yang berkepentingan dengan Pilkada DKI serta pihak lain. Postingan Buni Yani itu menjadi viral karena dishare oleh netizen ke berbagai media sosial lain. Inilah salah satu fungsi utama media yang bisa mengubah ‘hitam dan putih’ opini masyarakat.

Kami mengutip terkait transkrip video Ahok di Kepulauan Seribu saat bicara soal Surat Al Maidah ayat 51 itu secara utuh. Di dalam transkrip itu, Ahok memang tidak ada menyebut 'dibohongi Surat Al Maidah', namun 'dibohongi pakai Surat Al Maidah'. Berikut merupakan transkrip kutipan video tersebut:

"Jadi enggak usah pikiran 'Ah nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok, enggak suka sama Ahok nih," demikian petikan ucapan Ahok saat itu.

Dari transkrip pembicaraan tersebut, dapat diketahui bahwa penghilangan beberapa kosakata telah berakibat tafsir makna berbeda, seolah-olah Ahok melakukan tindakan penistaan agama Islam, memicu sebagian umat muslim yang terpengaruh video tersebut tanpa melihat transkrip sesungguhnya dan berpikir jernih serta objektif. Tindakan Buni Yani dalam perspektif Islam sesungguhnya sangat keji, karena berimplikasi hebat terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Apakah dapat dianggap tindakan fitnah dan provokasi, hanya hakim yang berwenang memutuskan kelak. Dalam tata bahasa Indonesia, perubahan satu fonem dalam kata maka akan menghasilkan perbedaan makna, demikian jika satu kata dalam suatu wacana dihilangkan juga mengubah makna wacana tersebut, inilah yang terjadi dalam kasus Ahok.

‘MUI Menyatakan Ahok Lakukan Penistaan Agama’, dalam judul artikel tersebut dapat diketahui reaksi yang terjadi kemudian, masyarakat yang tidak betul-betul

memahami akar masalahnya menjadi semakin tersulut emosinya, hal itu karena MUI mempertegas sikap dengan mengeluarkan fatwa kasus Ahok. Berikut merupakan Fatwa MUI yang menjadikan kasus Ahok semakin heboh, seolah melegitimasi bahwa Ahok bersalah, terlepas apakah sudah dilakukan kajian mendalam secara objektif atau tidak, hal tersebut semakin memperkeruh suasana politik Indonesia.

1. Alquran Surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

"Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Ahok telah dikategorikan melakukan penistaan agama dan menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum," tegas KH Maruf Amin dalam siaran pers, Selasa (11/10/2016). Sikap MUI kemudian merekomendasikan pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Alquran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Sikap MUI yang tanpa kompromi telah memicu berbagai kalangan di tanah air, baik mendukung maupun kontra, seharusnya lembaga tersebut bisa menengahi dengan adil dan bijaksana sebelum membuat fatwa yang terkesan dipaksakan, karena tidak mengundang Ahok untuk minimal diketahui bagaimana kronologis sesungguhnya.

‘Tak Kuasa Menahan Air Mata, Penjaga Masjid Mendadak Memeluk Ahok’. Judul artikel tersebut mungkin dapat kami jadikan referensi terkait sikap toleransi beragama di Indonesia, saat Ahok mengunjungi pulau Kelapa di Kepulauan Seribu, 30-01-2017, dalam kunjungan 2,5 jam tersebut Ahok berdialog dengan warga, tiba-tiba didatangi pria paruh baya yang bertanggungjawab mengurus keperluan masjid bernama Syahide, sambil memeluk mengatakan dia marbot yang awal Desember 2016 diberangkatkan umroh oleh Pemprov DKI dengan mata berkaca-kaca. Tindakan itu dijawab Ahok bahwa Pemprov DKI ingin yang merawat masjid bisa melihat Ka’bah. Sebelumnya Syahide sudah 8 tahun menjadi marbot di Pulau Kelapa. Makna tersirat yang bisa dipahami, meski bukan

muslim tetapi Ahok membuat program Umroh gratis bagi pengurus masjid di DKI, suatu contoh konkret indahnya keberagaman yang saat ini mungkin sudah mulai langka. Umroh atau Haji merupakan keinginan sebagian besar umat Islam, sebagai marbot Umroh adalah impian saja, namun saat ini mimpi itu dibuat nyata oleh Pemprov DKI.

“Ahok Hampiri Warga yang Lumpuh dan Pakai Kaos Agus-Sylvi”, judul artikel tersebut menarik untuk dicermati. Saat Ahok menghampiri Farida, warga yang menderita lumpuh karena penyakit polio, warga tersebut diajak berbicara oleh Ahok “punya kursi roda, enggak?” Farida terlihat kesulitan menjawab, “punya” jawabnya dengan terbata. Kemudian Ahok bertanya lagi tentang kebutuhan lain yang diperlukan, Farida hanya diam. Akhirnya Ahok bertanya lagi, “Ada yang bisa kami bantu lagi?” Tahu saya siapa kan?” Farida mengaku mendukung Ahok meski mengenakan kaos bergambar paslon 1. Kami menganalisis meski mengenakan kaos paslon lain tetapi Ahok tetap mau berdialog dan menawarkan bantuan terhadap warga tersebut. Suatu sikap bijaksana dalam kampanye damai sangat dibutuhkan, meski yang dihadapi mungkin pendukung paslon lain. Siapapun yang terpilih nanti hendaknya mampu menaungi semua warga tanpa melihat basis massanya. Dua contoh tindakan Ahok di atas telah kami gunakan untuk menganalisis bagaimanakah sikap Ahok, meski saat ini sedang menghadapi sidang penistaan agama. Umroh gratis bagi marbot merupakan hal pertama dalam sejarah Pemprov DKI, bersikap perhatian dan santun terhadap warga pendukung paslon lain merupakan contoh kedewasaan berpolitik, mungkin kita bisa gunakan dua hal tersebut sebagai tauladan sikap dalam kehidupan berpolitik di tanah air.

Terdapat beberapa pihak yang merasa diuntungkan jika Ahok akan dijadikan tersangka, entah terkait Pilkada atau hal lainnya, judul artikel “Pemuda Muhammadiyah Yakin Ahok Bakal Divonis Salah” sangat menarik untuk dicermati. Pernyataan Sekum PP Pemuda Muhammadiyah, pelapor penistaan agama mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah, Pedri Kasman yakin Ahok layak divonis bersalah sesuai pasal 156a KUHP dengan ancaman lima tahun. Hal itu berdasarkan fakta persidangan 27 Desember 2016, Hasil uji forensik Puslabfor juga menyebutkan bahwa rekaman video itu asli. Begitu besar hasrat pihak lain yang ingin Ahok dipenjara karena dengan sendirinya akan gagal di Pilkada, menarik untuk memahami dengan jernih bahwa kasus ini dipicu oleh tindakan Buni Yani yang menghilangkan beberapa kata dari ucapan Ahok, hal ini yang memicu marahnya sebagian umat muslim di Indonesia, padahal Ahok mengatakan hal yang berbeda di dalam video Buni Yani tersebut.

Apakah makna di balik besarnya kasus penistaan agama oleh Ahok? Pertanyaan tersebut menarik untuk diketahui jawabannya dari hasil beberapa kali sidang dan implikasi terhadap beberapa kasus pilkada lain, termasuk yang menimpa Sylvi paslon DKI 1. Pemeriksaan Polri terhadap Sylvi atas perintah Kapolri karena azas *Equality before the Law*, hal itu mengesampingkan Perkap masa Badrodin Haiti yang melarang pemeriksaan selama proses Pilkada untuk menghilangkan kesan politisasi. Atas desakan masyarakat maka Ahok ditetapkan tersangka pada 16-11-2016, prinsip inilah yang juga digunakan kapolri untuk memerintahkan pengusutan kasus Pilkada lain. Perintah Kapolri

tersebut mendapat resistensi keras terutama pihak pengusung paslon 1, “Menurut Demokrat, Kasus Sylviana Semestinya Diproses Setelah Pilkada”. Judul artikel tersebut sangat menarik karena disampaikan oleh Waka DPP Demokrat Agus Hermanto, yang menilai Kepolisian seharusnya menunda pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan masjid Al Fauz di kantor Walikota Jakarta Pusat serta pengelolaan dana Bansos Pemprov DKI di Kwarda Pramuka DKI 2014/2015. Perlakuan polisi terhadap pengusutan kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan penodaan agama oleh Ahok. Karena kalau Ahok semua masyarakat meminta tapi Sylvi tidak ada masyarakat yang meminta. Proses penyelesaiannya bisa menunggu Pilkada selesai, Kapolri terpaksa mengesampingkan Perkap sebelumnya, yang menyatakan pengusutan terhadap calon kepala daerah harus menunggu Pilkada selesai agar tidak terjadi politisasi dan kesan kriminalisasi dengan memanfaatkan penegakan hukum. Menurut Kapolri, kasus Ahok menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus lain yang menyeret peserta Pilkada, Bukankah seharusnya hukum itu berlaku adil kepada semua, jadi jika terdapat keberatan/resistensi apalagi dari anggota dewan dari partai yang berkepentingan dengan Pilkada, kita dapat melihat besarnya hasrat politik untuk menggajal Ahok lewat kasus penistaan agama, karena tidak berhasil digajal lewat berbagai kasus kriminal lainnya. Mencermati perkembangan proses peradilan Ahok, patut diduga mungkin saksi pelapor diatur sedemikian rupa untuk memperkarakan Ahok, yakni urusan politik dibungkus perkara pidana. Jika melihat perkembangan dalam proses peradilan Ahok, dapat dipahami tersirat bahwa kasus tersebut lebih dominan unsur politik daripada unsur penistaan agama.

Simpulan

Dari analisis makrostruktur terhadap Ahok dalam pemberitaan di berbagai media yang kami himpun, dapat ditemukan bahwa terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, yakni Ahok dalam masa kampanyenya terganjal kasus penistaan agama, dapat dijadikan motif politik untuk tujuan memenangkan Pilkada DKI Jakarta melalui kasus penistaan agama tersebut. Salah satunya adalah besarnya hasrat politik untuk menggajal Ahok melalui kasus penistaan agama, karena Ahok tidak berhasil digajal melalui berbagai kasus kriminal lainnya.

Daftar Pustaka

- Aliah Darma, Y. (2009). *Analisis wacana kritis*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Aziza, K.S. (2017). “Ahok hampiri warga yang lumpuh dan pakai kaos agus-sylvi”. (<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/30/11534701/ahok.hampiri.warga.yang.lumpuh.dan.pakai.kaus.agus-sylvy>). Diakses pada 30-01-2017.

Batubara, H. (2016). "Buni yani akui salah transkrip ucapan ahok soal surat Al Maidah ayat 51", (<https://news.detik.com/berita/3337570/buni-yani-akui-salah-transkrip-ucapan-ahok-soal-surat-al-maidah-ayat-51>). Diakses pada 30-01-2017.

Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). *Discourse as social interaction*. London: Sage Publication

Lotulung, G.A. (2017). "Menurut Demokrat, kasus Sylviana semestinya diproses setelah pilkada". (<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/12042141/menurut.demokrat.kasus.sylviana.semestinya.diproses.setelah.pilkada>). Diakses pada 30-1-2017

Moleong, L. J. (2008). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Purnama, D. (2016). "MUI menyatakan Ahok Lakukan Penistaan Agama". (<http://news.okezone.com/read/2016/10/11/338/1511969/mui-menyatakan-ahok-lakukan-penistaan-agama>). Diakses pada 30-01-2017.

Uya. (2017). "Tak kuasa menahan air mata, penjaga masjid mendadak memeluk ahok". (<http://www.jawapos.com/read/2017/01/30/105992/tak-kuasa-menahan-air-mata-penjaga-masjid-mendadak-memeluk-ahok>). Diakses pada 30-01-2017.

Van Dijk, T., A. (1998). *News as discourse*. Hillsdale. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Wiryo, S. (2017). "Pemuda Muhammadiyah yakin ahok bakal divonis salah" (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/26/okdtaa361-pemuda-muhammadiyah-yakin-ahok-bakal-divonis-salah>). Diakses pada 30-01-2017.